VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

MANAJEMEN OBJEK WISATA BUNTU BURAKE DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANA TORAJA

Satriavi Haliza[1)]*, Abdul Hamid[2)], Rachmad[3)]

[1] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
satriavihaliza@gmail.com
[2] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
al_hamidku@yahoo.co.id
[3] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
rachmadmhad8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen Objek Wisata Buntu Burake oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sebanyak lima orang, yaitu Sekretaris Dinas Pariwisata, staf/pengelola usaha pariwisata, petugas penanggung jawab objek wisata, pedagang, dan pengunjung. Analisis menggunakan fungsi manajemen George R. Terry yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan telah berjalan melalui pemetaan daya tarik, promosi digital, pembagian peran antarorganisasi perangkat daerah, penugasan petugas, serta pelaporan dan pengawasan. Kolaborasi melibatkan Dinas Pariwisata, perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan perumahan, keamanan, lingkungan hidup, pendapatan daerah, serta penyediaan air. Namun, pelaksanaan belum sepenuhnya optimal pada aspek pemeliharaan fasilitas. Jembatan kaca yang mengalami kerusakan belum dapat digunakan, sedangkan toilet umum terkendala ketersediaan air. Data pengunjung menunjukkan kenaikan dari 41.723 orang pada 2021 menjadi 200.823 orang pada 2023, sementara pendapatan turun dari Rp2.279.504.000 pada 2022 menjadi Rp2.232.335.000 pada 2023. Penelitian menyimpulkan bahwa fungsi manajemen telah dijalankan, tetapi perlu penguatan pemeliharaan fasilitas, koordinasi lintas perangkat daerah, dan pengawasan langsung di lapangan.

Kata kunci: Manajemen; Objek Wisata; Buntu Burak, Pariwisata

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ABSTRACT

This study examines the management of Buntu Burake Tourism Attraction by the Tana Toraja Regency Tourism Office. It employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Five informants were selected purposively: the Tourism Office Secretary, tourism staff, the site officer in charge, a local vendor, and a visitor. The analysis applies George R. Terry's management functions: planning, organizing, actuating, and controlling. The findings indicate that management activities have been carried out through tourism-potential identification, digital promotion, division of responsibilities among local government agencies, assignment of site personnel, reporting, and supervision. The collaboration involves the Tourism Office and agencies responsible for public works, security, environmental cleanliness, local revenue, and water services. Nevertheless, facility maintenance remains a significant weakness. The glass bridge has remained closed following damage, while public toilets cannot operate properly because of inadequate water supply. Visitor numbers increased from 41,723 in 2021 to 200,823 in 2023, whereas revenue declined from IDR 2,279,504,000 in 2022 to IDR 2,232,335,000 in 2023. The study concludes that the management functions have been implemented, but facility maintenance, inter-agency coordination, and direct field supervision need to be strengthened.

Keywords: Management, Tourism Attraction, Buntu Burake, Tourism

Submisi: 12-10-2026
Diterima: 13-10-2026
Dipublikasikan: 11-11-2026

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menggerakkan perekonomian daerah melalui kunjungan wisatawan, kegiatan usaha masyarakat, dan pemanfaatan potensi lokal. Pengelolaan destinasi tidak cukup hanya mengandalkan daya tarik alam atau bangunan ikonik. Destinasi juga membutuhkan perencanaan yang terarah, pembagian tanggung jawab yang jelas, pelaksanaan program yang konsisten, serta pengawasan terhadap kualitas layanan dan fasilitas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menempatkan pembangunan kepariwisataan sebagai proses yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 yang mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan untuk periode 2022-2030. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti:

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata: Strategi untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada dan menciptakan destinasi baru.
b. Pembangunan Industri Pariwisata: Langkah-langkah untuk mendukung industri pariwisata lokal.
c. Pemasaran Pariwisata: Strategi pemasaran untuk menarik lebih banyak wisatawan.
d. Kelembagaan Pariwisata: Penguatan kelembagaan yang terkait dengan pariwisata.

Kabupaten Tana Toraja memiliki potensi wisata alam, budaya, dan religi. Salah satu destinasi yang menonjol adalah Buntu Burake di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale. Kawasan ini dikenal melalui patung Yesus Kristus, panorama perbukitan, serta pemandangan Kota Makale. Lokasinya berjarak sekitar lima kilometer dari pusat Kota Makale dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Daya tarik tersebut menjadikan Buntu Burake sebagai salah satu tujuan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Perkembangan jumlah kunjungan memperlihatkan potensi destinasi ini. Data Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja mencatat 41.723 pengunjung pada 2021, meningkat menjadi 174.637 pada 2022, dan mencapai 200.823 pada 2023. Pendapatan yang tercatat juga meningkat dari Rp303.908.000 pada 2021 menjadi Rp2.279.504.000 pada 2022, tetapi turun menjadi Rp2.232.335.000 pada 2023. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengunjung tidak selalu diikuti kenaikan pendapatan dengan pola yang sama. Komposisi wisatawan, tarif masuk, dan kondisi kunjungan dapat ikut memengaruhi penerimaan.

Daya tarik tersebut, hasil observasi menemukan persoalan fasilitas yang perlu mendapat perhatian. Jembatan kaca yang sempat dibuka untuk pengunjung mengalami kerusakan dan belum kembali dioperasikan. Fasilitas toilet umum juga belum berfungsi dengan baik karena ketersediaan air yang tidak memadai. Pengunjung akhirnya menggunakan toilet yang disediakan pedagang dengan biaya tertentu. Kondisi ini dapat memengaruhi kenyamanan dan pengalaman wisatawan, sekaligus menunjukkan bahwa pengembangan destinasi harus diikuti pemeliharaan sarana secara berkelanjutan.

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

Pengelolaan Buntu Burake melibatkan lebih dari satu organisasi. Dinas Pariwisata menjalankan fungsi promosi dan koordinasi, sementara perangkat daerah lain memiliki tanggung jawab sesuai bidangnya, antara lain pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur, keamanan, kebersihan, pengelolaan retribusi, dan penyediaan air. Keterlibatan banyak pihak membutuhkan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas agar persoalan fasilitas tidak terabaikan.

Penelitian ini menggunakan fungsi manajemen George R. Terry sebagaimana dikutip Sukarna (2011:10), yaitu *planning, organizing, actuating,* dan *controlling*. Keempat fungsi ini digunakan untuk melihat bagaimana pengelolaan direncanakan, bagaimana tugas dan sumber daya diatur, bagaimana pelaksanaan digerakkan, serta bagaimana kegiatan diawasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis manajemen Objek Wisata Buntu Burake oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih untuk memahami proses pengelolaan objek wisata berdasarkan pengalaman, penjelasan, dan tindakan para pihak yang terlibat. Lokasi penelitian berada di Objek Wisata Buntu Burake dan lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja.

Informan ditentukan secara purposive sebanyak lima orang, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan destinasi. Karakteristik informan dalam penelitian ini terdiri atas Sekretaris Dinas Pariwisata, staf/pengelola usaha pariwisata, petugas penanggung jawab di objek wisata, pedagang, dan pengunjung objek wisata.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi serta data administrasi terkait jumlah kunjungan dan pendapatan objek wisata. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis substantif disusun berdasarkan empat fungsi manajemen George R. Terry: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Buntu Burake merupakan destinasi wisata religi dan alam yang berada di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Daya tarik utamanya adalah patung Yesus Kristus yang berada di kawasan perbukitan, dengan panorama alam yang dapat dinikmati dari ketinggian. Selain menjadi lokasi kunjungan wisata, keberadaan destinasi ini membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama pedagang yang menjual makanan, minuman, dan oleh-oleh.

Data tahun 2021–2023 memperlihatkan kenaikan jumlah pengunjung secara bertahap. Pada 2021 tercatat 41.723 pengunjung, kemudian meningkat menjadi 174.637 pada 2022 dan 200.823 pada 2023. Dari sisi pendapatan, penerimaan tahun 2021 sebesar Rp303.908.000, meningkat menjadi Rp2.279.504.000 pada 2022, lalu sedikit menurun

menjadi Rp2.232.335.000 pada 2023. Penurunan pendapatan pada 2023 terjadi ketika jumlah pengunjung justru meningkat. Dokumen penelitian menjelaskan bahwa komposisi wisatawan yang lebih banyak berasal dari wisatawan lokal dan perbedaan tarif masuk menjadi salah satu konteks yang perlu diperhatikan.

Tabel 1.
Data Pengunjung dan Pendapatan Objek Wisata Buntu Burake

Tahun	Pendapatan	Jumlah Pengunjung
2021	Rp303.908.000	41.723
2022	Rp2.279.504.000	174.637
2023	Rp2.232.335.000	200.823

(Sumber: Dinas Pariwisata Tana Toraja, 2026)

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pengelolaan Buntu Burake berangkat dari identifikasi potensi wisata yang dimiliki kawasan tersebut, antara lain patung Yesus sebagai daya tarik religi, panorama alam, perbukitan, dan titik-titik untuk menikmati pemandangan. Perencanaan juga mencakup kebutuhan infrastruktur, promosi, pengelolaan sumber daya manusia, serta perhatian terhadap lingkungan. Dalam hal promosi, Dinas Pariwisata mendorong pemanfaatan media sosial dan pemasaran digital dengan menampilkan foto maupun video yang memperlihatkan keunikan kawasan.

Salah satu persoalan yang memperlihatkan jarak antara rencana dan hasil pelaksanaan adalah jembatan kaca. Berdasarkan keterangan Sekretaris Dinas Pariwisata, pembangunan jembatan dibahas bersama perangkat daerah terkait pada 2018. Fasilitas tersebut sempat digunakan, tetapi mengalami kerusakan setelah beberapa bulan dan belum dioperasikan kembali pada saat penelitian. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan infrastruktur perlu memasukkan aspek kelayakan teknis, standar keselamatan, biaya pemeliharaan, dan penanggung jawab perawatan setelah pembangunan selesai.

Dengan demikian, fungsi perencanaan telah dijalankan melalui pengenalan potensi dan penyusunan arah promosi maupun kebutuhan fasilitas. Namun, kualitas perencanaan belum dapat dinilai optimal hanya dari tersusunnya rencana. Keberhasilan perencanaan perlu diukur dari tindak lanjut terhadap fasilitas yang rusak, kepastian pemeliharaan, serta ketersediaan kebutuhan dasar seperti air dan toilet umum.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian peran antara Dinas Pariwisata, petugas lapangan, masyarakat, dan sejumlah organisasi perangkat daerah. Dinas Pariwisata berperan dalam promosi dan koordinasi. Perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan perumahan terlibat dalam urusan infrastruktur, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung keamanan, Dinas Lingkungan Hidup menangani kebersihan, perangkat pengelola keuangan dan pendapatan daerah menangani retribusi, sedangkan PDAM berkaitan dengan penyediaan air. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi bersifat lintas sektor.

Dinas Pariwisata juga membentuk kelompok petugas dari tenaga kontrak untuk menjalankan pengelolaan di lokasi. Keterangan petugas penanggung jawab menyebutkan bahwa terdapat tiga orang petugas yang bekerja dengan sistem pergantian setiap dua hari. Tugas operasional meliputi penjagaan lokasi, pelayanan tiket, pencatatan penerimaan, dan pelaporan kondisi objek wisata. Pengaturan ini membantu memastikan kegiatan sehari-hari tetap berjalan meskipun tidak seluruh pekerjaan dilakukan langsung oleh pegawai dinas.

Dari sisi struktur kerja, pembagian peran antarinstansi dan pembentukan petugas merupakan langkah positif. Meski demikian, pengorganisasian masih perlu diperkuat melalui penegasan siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas tertentu, bagaimana koordinasi dilakukan ketika ditemukan kerusakan, dan bagaimana tindak lanjutnya dipantau. Ketersediaan struktur dan pembagian tugas perlu disertai mekanisme koordinasi yang menghasilkan penyelesaian masalah di lapangan.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan terlihat dari upaya Dinas Pariwisata mempromosikan Buntu Burake melalui media sosial, termasuk Facebook, Instagram, dan YouTube. Materi promosi berupa foto dan video udara digunakan untuk memperlihatkan panorama dan keunikan destinasi. Promosi digital menjadi cara yang relatif mudah menjangkau calon wisatawan dan memperluas informasi mengenai objek wisata.

Pada aspek sumber daya manusia, petugas di lokasi diberi tanggung jawab untuk menjaga objek wisata, melayani pengunjung, mencatat penerimaan, serta melaporkan kondisi harian kepada dinas. Petugas juga menyampaikan laporan dan menyetorkan kupon atau karcis secara berkala. Pola komunikasi tersebut memperlihatkan adanya arahan dan koordinasi dari dinas kepada petugas lapangan.

Meskipun demikian, pengalaman pengunjung dan pedagang memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan masih dibatasi oleh fasilitas. Pedagang menyampaikan bahwa pelayanan secara umum cukup baik, tetapi jembatan kaca belum dapat digunakan dan toilet umum tidak berfungsi karena air tidak memadai. Pengunjung juga menyampaikan bahwa mereka harus menggunakan toilet yang disediakan pedagang dan membayar. Artinya, promosi dan penggerakan petugas perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan fasilitas dasar. Daya tarik destinasi dapat mendatangkan pengunjung, tetapi kenyamanan selama kunjungan turut menentukan penilaian terhadap kualitas pengelolaan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dilaksanakan melalui koordinasi Kepala Dinas Pariwisata dengan staf dan bendahara penerimaan, serta pelaporan rutin dari petugas yang bertugas di lokasi. Petugas diwajibkan menyampaikan kondisi objek wisata setiap hari dan menyetorkan kupon atau karcis secara berkala. Pemeriksaan karcis dan pencatatan penerimaan menjadi bagian dari pengawasan administrasi, sementara staf dinas juga ditugaskan memeriksa fasilitas.

Pengawasan keamanan dan kebersihan turut melibatkan Satpol PP serta masyarakat sekitar. Pedagang dan pengunjung juga menunjukkan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas. Partisipasi pengguna kawasan menjadi unsur pendukung karena pemeliharaan destinasi tidak hanya bergantung pada aparat pemerintah.

Namun, hasil pengamatan dalam penelitian menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya hadir secara langsung di lokasi. Koordinasi dan pelaporan administratif telah berjalan, tetapi kondisi jembatan kaca dan toilet memperlihatkan bahwa temuan kerusakan belum dituntaskan. Oleh sebab itu, pengawasan perlu mencakup pemeriksaan fisik berkala, pencatatan kondisi fasilitas, batas waktu tindak lanjut, dan penetapan unit yang bertanggung jawab. Pengawasan yang efektif tidak berhenti pada penerimaan laporan, melainkan memastikan adanya tindakan korektif.

Berdasarkan kerangka POAC George R. Terry, bahwa manajemen Buntu Burake telah memiliki unsur dasar yang diperlukan: potensi dan kebutuhan destinasi telah diidentifikasi, pembagian tugas lintas pihak telah dibentuk, promosi serta operasional petugas telah dijalankan, dan mekanisme pelaporan telah tersedia. Kekuatan utama pengelolaan terletak pada keterlibatan beberapa perangkat daerah dan adanya petugas yang bertanggung jawab di lokasi.

Tantangan utama berada pada kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jembatan kaca yang belum kembali difungsikan serta toilet yang terkendala air merupakan contoh persoalan yang memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah dan tindak lanjut yang terukur. Karena itu, pengelolaan Buntu Burake lebih tepat dipahami telah berjalan dan menunjukkan sejumlah capaian, tetapi belum optimal pada pemeliharaan fasilitas dan pengawasan korektif. Penilaian ini lebih mencerminkan keseluruhan temuan lapangan dibandingkan menyatakan seluruh fungsi manajemen telah optimal tanpa pengecualian.

SIMPULAN

Manajemen Objek Wisata Buntu Burake oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja telah dilaksanakan melalui empat fungsi manajemen. Pada fungsi perencanaan, dinas telah mengidentifikasi potensi wisata serta kebutuhan promosi dan infrastruktur, tetapi perbaikan jembatan kaca dan pemenuhan air untuk toilet belum terselesaikan. Pada fungsi pengorganisasian, pembagian tugas lintas perangkat daerah dan pembentukan petugas lapangan telah mendukung operasional, meskipun penanggung jawab pemeliharaan fasilitas perlu diperjelas. Pada fungsi penggerakan, promosi digital, penugasan petugas, dan pelaporan harian telah dilakukan, tetapi mutu layanan masih dipengaruhi keterbatasan fasilitas. Pada fungsi pengawasan, koordinasi, pemeriksaan karcis, dan pelaporan telah berjalan, namun pengawasan fisik dan tindak lanjut atas kerusakan perlu diperkuat.

Berdasarkan temuan tersebut, Dinas Pariwisata bersama perangkat daerah terkait perlu menyusun prioritas pemeliharaan fasilitas, terutama melakukan pemeriksaan teknis dan menentukan tindak lanjut terhadap jembatan kaca sebelum fasilitas tersebut dibuka kembali. Pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan air dan kelayakan toilet umum agar pengunjung memperoleh layanan dasar yang memadai. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah perlu dilengkapi pembagian tanggung jawab dan jadwal tindak lanjut yang jelas. Pengawasan langsung secara berkala, peningkatan kapasitas petugas dan pemandu wisata, serta evaluasi promosi berdasarkan data kunjungan dan pendapatan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Los Angeles, California: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Matantu, C. E. (2019). Pengelolaan objek wisata Lemo dan Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2(1), 23–31. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.919

Safitri, V. A. (2018). Manajemen Pariwisata Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata di Kota Magelang [Skripsi, Universitas Tidar]. Magelang: Universitas Tidar.

Sukarna. (2011). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Mandar Maju.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja. (2024). Data Jumlah Pengunjung dan Realisasi Pendapatan Objek Wisata Buntu Burake Tahun 2021–2023. Tana Toraja: Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja.

TENTANG PENULIS